

Jakarta, 17 Maret 2021

Nomor : 09/KNAKTP/RC/III/2021

Lampiran : Kerangka Acuan

Perihal : Peluncuran dan Diseminasi Tiga *Policy Brief* terkait Pemenuhan Hak Konstitusional, Dampak dan Kebijakan di Mata Perempuan serta Resiliensi Perempuan di Masa Pandemi Covid-19

**Yang terhormat**

**Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/CSO  
di tempat**

**Dengan hormat,**

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan Mekanisme Nasional untuk pemenuhan, perlindungan, serta promosi mengenai Hak Asasi Perempuan di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No.181/1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 65/2005. Salah satu mandat Komnas Perempuan adalah Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.

Komnas Perempuan telah merespon situasi kekerasan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di era pandemi Covid 19 dan kebiasaan baru, dengan melaksanakan beberapa kajian yang telah diterbitkan di Tahun 2020, diantaranya : (1) Survei dinamika perubahan di dalam rumah tangga selama Covid-19; (2) Situasi Layanan bagi perempuan korban kekerasan dan perempuan pembela HAM di masa pandemik Covid-19, dan (3) Buku hasil kajian yang berjudul 'Menata Langkah dalam Ketidakpastian: Memperkuat Gerak Juang Perempuan di Masa Pandemi Covid dan 3 buah *Policy Brief*, yang menjadi rekomendasi kepada Pemerintah, Kementerian/Lembaga terkait. Lebih lanjut di tahun 2021, Komnas Perempuan melakukan pengembangan dua buah *Policy Brief* lainnya, dengan *Policy Brief* pertama telah selesai dikembangkan di Tahun 2020 serta melakukan harmonisasi kebijakan dengan Kementerian Lembaga di Tahun 2021 ini.

Dalam Rangka Peluncuran dan Diseminasi Tiga *Policy Brief* terkait Pemenuhan Hak Konstitusional, Dampak dan Kebijakan di Mata Perempuan serta Resiliensi Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, termasuk Infografis dan Video Grafis dari Hasil Kajian yang dikembangkan. Untuk itu, sebagai tindak lanjut, Tim Kajian Covid mengundang Bapak/Ibu dalam Peluncuran dan Diseminasi Tiga *Policy Brief* terkait Pemenuhan Hak Konstitusional, Dampak dan Kebijakan di Mata Perempuan serta Resiliensi Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021

Waktu : 09.00- 13.00 WIB

Tempat : Pertemuan Daring menggunakan Zoom Webinar dengan link:

<http://bit.ly/Peluncuran3PolicyBriefKP>

Demikian surat ini kami sampaikan. Untuk koordinasi selanjutnya kami bisa dihubungi melalui Komnas Perempuan Via Telepon di 021 3903963 atau Via HP staf kami Isti Fadatul K, di 081320258095 atau Runi Lestari di 087872549731. Untuk perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan banyak terima kasih.

**Hormat Kami,**

**Retty Ratnawati**

Ketua Tim Kajian COVID-19

## **Daftar Undangan Acara Peluncuran dan Diseminasi *Policy Brief* 24 Maret 2021**

1. Ketua LPSK
2. Ketua Ombudsman RI
3. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia
4. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
5. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Politik Hukum dan HAM
6. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
8. Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
9. Direktur Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI
10. Bareskrim Kepolisian RI
11. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI
12. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Olahraga Bappenas RI
13. Ketua Gugus Tugas Covid-19 RI
14. Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI
15. Kejaksaan Agung RI
16. Balitbang Kemenkumham RI
17. Prof. Irwanto, Ph.D., Psikolog.
18. Dr. Johanna Debora Imelda, M.A.
19. Dr. Susi Tanjung, M.Si.
20. Ketua BPJS
21. Ketua PKWJ UI
22. Dekan Fakultas Hukum UI
23. Dekan Fakultas Psikologi UI
24. Ketua PSG Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
25. Ketua PSG Universitas Negeri Jakarta
26. Ketua PSG Universitas Pancasila
27. PP Fatayat NU
28. PP Muslimat NU
29. PP Nasyiatul Aisyiyah
30. Lajnah Imaillah Ahmadiyah
31. HKBP
32. PGI
33. PERUATI
34. PP Dewan Masjid Indonesia
35. INFID
36. Pimpinan Wandani
37. Persatuan Wanita Kristen Indonesia
38. Wanita Katolik Republik Indonesia
39. Wanita Hindu Dharma Indonesia
40. Paguyuban Wanita Buddha
41. HWDI
42. Direktur Migrant Care
43. Direktur Yayasan Pulih
44. Direktur LBH APIK Jakarta
45. Direktur Kalyanamitra
46. Direktur Kapal Perempuan
47. Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan
48. Direktur ICJR
49. Direktur PKBI
50. Ketua Solidaritas Perempuan
51. Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan
52. Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

53. Pimpinan Perkumpulan Kepala Keluarga (PEKKA)
54. Pimpinan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)
55. Rahima
56. Rumah Kitab
57. YAKKUM
58. SAPDA
59. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
60. Kalyana Mitra
61. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
62. CWI, Yolanda
63. KASBI
64. EMPU
65. Libu Perempuan atau Lingkaran Belajar untuk Perempuan
66. LAPPAN
67. Solidaritas Pangan Jogja
68. WBI
69. Media Masa cetak dan elektronik
70. Semua lembaga layanan sebagai partisipan lembaga layanan kaji covid 19